



Komisiner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Dilya Pusgitarini (kanan) mendengarkan cerita dari orang tua korban saat konferensi pers pengungkapan kasus dugaan kekerasan dan penelantaran terhadap anak oleh Daycare Little Aresha di Mapolresta Jogja, Senin (27/4).

► **KEKERASAN ANAK**

Pemkot Siapkan Pendampingan Psikologis

UMBULHARJO—Wali Kota Jogja, **Hasto Wardoyo**, memastikan penanganan anak-anak korban dugaan kekerasan daycare dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pemindahan tempat penitipan hingga pendampingan psikologis dan medis.

Stafel@hallojogja.com

Hasto menuturkan, Pemkot mencari *daycare* pengganti yang aman, berstandar baik, dan memiliki izin resmi, salah satunya TPA/KB/TK/Inklusi Pelangi Anak Negeri Yogyakarta di Sorosutan, Umbulharjo, yang dinilai layak setelah dilakukan pengecekan fasilitas, termasuk ketersediaan ruang ber-AC serta jumlah pengasuh dan guru yang memadai. "Kami mengamati langsung kondisi TPA Sinar Pelangi, termasuk naungannya dan tenaga pengasuhnya. Kami kemudian menitipkan tujuh anak dari Daycare Little Aresha ke sini," ujarnya saat meninjau TPA/KB/TK/Inklusi Pelangi Anak Negeri Yogyakarta, Rabu (29/4).

Wali Kota menjelaskan, anak-anak yang dipindahkan memiliki beragam kondisi, mulai dari bayi hingga anak usia dua tahun. Sebagian anak dalam kondisi normal dan sudah mampu berkomunikasi, sementara lainnya termasuk kategori inklusi, seperti gangguan bicara hingga anak dengan kondisi *down syndrome*. Pemkot Jogja, menurut Hasto, juga menawarkan alternatif *daycare*

► **Pemkot** mencari *daycare* pengganti yang aman, berstandar baik, dan memiliki izin resmi.

► **Sebagian** anak dalam kondisi normal, sementara lainnya termasuk kategori inklusi.

kepada seluruh orang tua terdampak. Dari total 103 anak, seluruhnya telah dilawari tempat penitipan pengganti, meski tidak semua orang tua langsung mengambil keputusan. "Kami sudah menyiapkan sekitar 17 *daycare* sebagai alternatif, dan itu dinilai cukup," katanya.

Selain pemindahan, Pemkot Jogja juga memberikan pendampingan intensif selama tiga bulan ke depan, terutama bagi anak dan orang tua yang mengalami tekanan psikologis. Setiap 4-5 anak akan didampingi satu psikolog, serta diperkuat dengan tambahan dokter spesialis anak.

Sebelumnya Pemkot juga membuka *helpdesk* pengaduan. Dari layanan tersebut, tercatat 194 laporan masuk, dengan 53 di antaranya telah ditangani pada tahap awal.

Dalam proses pemeriksaan, Hasto mengakui terdapat kendala, terutama obat-obatan dengan durasi kerja singkat. Ia mencantumkan obat jenis CTM yang memiliki efek terbatas sekitar delapan jam, sehingga menyulitkan saat pemeriksaan setelah rentang waktu tersebut.

Pendekatan pemeriksaan juga melibatkan metode psikologis. Anak-anak akan diwawani melalui pendampingan psikolog untuk mengidentifikasi tanda-tanda tertentu. Namun, hal ini tidak mudah, terutama bagi anak inklusi yang memiliki

keterbatasan komunikasi. "Ada lima anak inklusi, bahkan ada yang sudah berusia empat tahun namun belum bisa diajak berkomunikasi. Ini perlu ditelusuri kondisi sebelum dan sesudah dititipkan," katanya. Terkait dengan perizinan, Hasto menyebut masih terdapat 33 *daycare* yang belum berizin, termasuk yang terintegrasi dengan TK dan PAUD. Untuk sementara, sesuai arahan dari Pemda DIY, tempat-tempat tersebut diminta menghentikan aktivitas hingga proses perizinan selesai.

Penanganan Optimal

Sementara, Pemda DIY juga memastikan penanganan terhadap korban kekerasan di Daycare Little Aresha dilakukan seoptimal mungkin. "Penanganan harus seoptimal mungkin, baik terhadap anak-anak yang menjadi korban maupun orang tuanya," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) DIY, Eritna Hidayati Sumardi, Rabu.

Menurut dia, hal tersebut sesuai arahan Gubernur DIY, Sri Sultan HB X yang menginstruksikan penanganan dan perlindungan bagi 53 anak korban *daycare*. Tidak hanya menyasar fisik anak, tetapi juga kondisi mental orang tua yang terdampak.

Terlebih para orang tua korban kasus daycare juga pasti mengalami tekanan-tekanan psikologis, merasa beresah, dan ada kekhawatiran terhadap tumbuh kembang dan kesehatan fisik anaknya. "Terkait dengan pembiayaan, Sultan mengarahkan bahwa ini harus bisa di-cover Pemkot maupun Pemda DIY," katanya.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Walikota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan			

Yogyakarta, 17 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005